

KEES GROENEBOER

Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda*

Dengan datangnya Belanda pada akhir abad ke-16, bahasa Belanda juga menapakkan jejaknya di kepulauan Indonesia, tetapi penyebaran luas bahasa Belanda tidak pernah terjadi sepanjang masa kolonial.¹ Baru pada abad ke-20 ada kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan bahasa Belanda pada lapisan atas masyarakat pribumi. Hasilnya dua persen dari penduduk Indonesia pada 1940 mengenal bahasa Belanda. Bahasa Belanda tidak pernah menjadi bahasa pergaulan umum; dengan berjalannya waktu bahasa Melayu memperoleh fungsi menjadi *lingua franca*. Pertanyaannya adalah mengapa bahasa Belanda memainkan peran yang relatif kecil di Hindia Belanda dan bagaimana bahasa Melayu bisa menyebar luas dan akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Politik bahasa apakah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini memusatkan perhatian ke abad terakhir masa kolonial, pada periode sejak pertengahan abad ke-19. Pada masa sebelumnya, sebenarnya tidak dilaksanakan suatu politik bahasa yang eksplisit. Pada masa VOC, misalnya, hanya dilakukan sedikit upaya untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan, meskipun pada

*Disunting kembali dari makalah Seminar Sejarah Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 20 Mei 1995; diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Drs. Christina Suprihatin.

¹Tulisan ini didasarkan buku K. Groeneboer, *Weg tot het Westen; Het Nederlands voor Indië 1600–1950; Een taalpolitieke geschiedenis* (Leiden: KITLV Uitgeverij 1993). Edisi bahasa Indonesia terbit pada akhir tahun 1995 berjudul *Jalan ke Barat, Bahasa Belanda di Hindia-Belanda 1600-1950; Sejarah Politik Bahasa*, terjemahan Dra. Jessy Augustin (Jakarta: Erasmus Taalcentrum [Erasmus Educatief 6.]).

waktu itu bahasa Belanda telah dianggap penting untuk menyatukan penduduk dan menjaga kesetiaan penduduk pribumi kepada pemerintah kolonial. Pendidikan berbahasa Belanda yang ada hanya dimaksudkan bagi penduduk Eropa. Pendidikan bagi penduduk pribumi hanya ada di beberapa wilayah berpenduduk Kristen dan sebagai bahasa pengantar digunakan bahasa Melayu. Dengan alasan pragmatis, bahasa Melayu semakin banyak dipakai sebagai *lingua franca*, bahasa yang sejak kedatangan orang Belanda di Nusantara telah dikenal sebagai bahasa pergaulan antarsuku dan antarpulau.

Sampai pertengahan abad ke-19 pendidikan milik pemerintah hanya untuk anak-anak Eropa, yang sebagian besar, sekitar 80% adalah orang Indo. Mereka biasanya hidup dalam keluarga yang tidak berbahasa Belanda, dibesarkan dengan bahasa Melayu atau dengan salah satu bahasa daerah lain, dan bahasa Belanda bagi mereka paling-paling merupakan 'bahasa ayah' (yaitu bahasa ibu dari sang ayah). Sebagai pengecualian hanya beberapa anak laki-laki dari elite pribumi diperkenankan masuk Sekolah Dasar Eropa (*Europese Lagere School*, ELS), tetapi pada 1850 hanya ada 50 anak pribumi dari 3.500 murid.

Sekolah pemerintah yang pertama untuk anak pribumi baru dibuka pada 1849 yakni empat Sekolah Amtenar Pribumi (*Hoofdenschool*) dengan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya dan bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran. Apakah bahasa Belanda pada sekolah-sekolah tersebut tidak harus menjadi bahasa pengantar, atau paling tidak menjadi mata pelajaran? Untuk pertanyaan itu diberikan jawaban negatif: programnya akan menjadi terlalu sarat, lagipula pegawai Eropa tidak lagi akan mempunyai motivasi untuk belajar bahasa pribumi, yang justru dikehendaki oleh pemerintah. Namun pertanyaan tersebut tetap saja dibicarakan. Demikianlah 'masalah bahasa pengantar' pada pendidikan pribumi muncul dan tidak akan lenyap sampai akhir masa kolonial—kurang lebih seratus tahun kemudian. Dalam tulisan ini masalah bahasa pengantar dibahas sehubungan dengan tiga periode yang menentukan dalam sejarah politik bahasa di Hindia Belanda: tahun lima dan enam puluhan abad ke-19, dua dasawarsa pertama abad ke-20 dan akhirnya kurun waktu sekitar Perang Dunia II.

PEMBUKAAN “GERBANG MENUJU KE BARAT” (1864)

Dalam Peraturan Pemerintah tahun 1854 di Negeri Belanda ditentukan titik tolak Pendidikan Pribumi di Hindia Belanda. Pendidikan yang terlalu berorientasi ke Barat disisihkan, dengan menunjukkan dampak negatif pendidikan semacam itu di Hindia Inggris sejak 1830-an, yang bermanfaat

untuk 'pendidikan menuju otonomi'. Penyebaran pengetahuan yang tak terkontrol melalui bahasa Belanda dapat membahayakan pemerintah kolonial. Terutama juga karena adanya 'perburuan kerja' sebagai akibat pendidikan Barat di Hindia Inggris, dampaknya muncul kekecewaan dan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Dua puluh tahun berlalu begitu saja dan baru pada 1870-an benar-benar terjadi perluasan pendidikan pribumi di Hindia Belanda, berhubungan mulai fase sosial-ekonomi baru. Di satu pihak hal itu sebagai dampak dari penghapusan Sistem Tanam Paksa (Kulturstelsel) dan 'terbukanya' Hindia Belanda bagi pihak swasta, dan di lain pihak sebagai pengaruh lebih intensif dari Barat akibat membaiknya dan semakin singkatnya hubungan dengan Negeri Belanda. Kebutuhan akan orang terdidik untuk kantor dan perusahaan menyebabkan pesatnya perluasan pendidikan pribumi. Pendidikan itu – sesuai Keputusan Kerajaan Belanda tertanggal 30 Mei 1868 (*Koloniaal Verslag* 1871: 88) – akan diberikan dalam bahasa daerah, atau apabila itu tidak mungkin, baik karena terlalu sedikitnya perkembangan maupun karena kurangnya sarana belajar, diberikan dalam bahasa Melayu.²

Keputusan tahun 1854 untuk tidak memakai bahasa Belanda di sekolah-sekolah pribumi, lagi-lagi menjadi diskusi. Penyebabnya adalah usul pada saat itu agar Bahasa Belanda digunakan sebagai pengganti bahasa Melayu yang semakin merasuk, demi perbaikan kualitas pendidikan di wilayah yang telah dikristenkan, yaitu di Maluku dan Minahasa; tetapi juga karena usulan dari tahun 1857 untuk memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di Pulau Nias yang masih "menyembah berhala" dan baru saja dikuasai pemerintah Belanda, dengan demikian daerah itu sekaligus dapat dikristenkan. Kedua usulan itu menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengamati penyebaran bahasa Belanda pada penduduk pribumi di seluruh Indonesia.

²Pada 1865 pendidikan dasar bagi pribumi sudah diberikan dalam lima bahasa, yaitu (sesuai dengan tingkatan pentingnya) berturut-turut: bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Madura dan Batak-Mandailing. Sejak 1877 sampai dengan 1900, sudah menjadi 13 bahasa, yaitu (diurut sesuai abjad): bahasa Bawean, Bugis, Dayak, Gorontalo, Makasar, Nias, Sangir, Tumbulu, di samping yang telah disebutkan sebelumnya. Pada 1928 sudah disebarkan buku-buku sekolah dalam 24 bahasa. Suatu usaha agar setiap bahasa yang dipakai oleh paling tidak 100.000 orang akan dijadikan bahasa pengantar untuk pendidikan. Pada 1940 terdapat 30 bahasa Pribumi menjadi bahasa pengantar di pendidikan dasar, di samping bahasa-bahasa yang sudah disebutkan di atas, juga bahasa-bahasa (diurut menurut abjad): Aceh, Bada, Bali, Bare, Batak-Karo, Minangkabau, Irian Jaya Utara, Sasak, Sikan, Batak-Simelungun, Sumba, Tae, Ternate, Timor, Batak-Toba, Tobelo, Totemboan.

Sebagai pembelaan atas masuknya bahasa Belanda menjadi bahasa pergaulan di Pulau Nias, dikatakan bahwa pembelajaran bahasa Belanda akan seiring dengan penyebaran agama Kristen, yang juga tidak tanpa kepentingan negara. Baik melalui bahasa maupun melalui agama akan ada hubungan yang erat antara penduduk Nias yang masih dianggap sangat 'primitif' dan penguasa Belanda—suatu argumen yang tentu saja juga akan berlaku bagi kelompok penduduk yang masih “menyembah berhala” di wilayah lain di Nusantara, seperti orang Dayak di Borneo. Dengan cara itu akan dapat dicegah kesempatan penyebaran Islam melalui bahasa Melayu, yang seperti juga bahasa Belanda, merupakan bahasa asing di Pulau Nias. Kemudian tidak perlu buku ajar yang 'mahal' disusun dalam bahasa-bahasa Nias yang belum pernah dituliskan. Tetapi usul tersebut tidak terwujud, terutama karena muncul keragu-raguan yang besar mengenai hasil yang dapat dicapai dari pemasukan umum bahasa Belanda. Sesungguhnya masih belum terbukti bahwa penduduk pribumi memang memiliki kemampuan daya pikir untuk mempelajari bahasa Belanda yang amat sulit. Karenanya Nias hanya akan diasingkan dari wilayah Nusantara lainnya, suatu argumen yang justru membela masuknya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan umum. Pada akhir 1858 diputuskan untuk memberikan pendidikan di Nias dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, tidak dengan bahasa Belanda.

Sementara itu di Maluku dan Minahasa disebarkan angket untuk pegawai pemerintah dan para penyebar agama Kristen yang mendukung masuknya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar untuk menggantikan bahasa Melayu. Dengan dapat dicapainya berbagai sumber berbahasa Belanda akan muncul perkembangan daya pikir yang lebih baik, pelaksanaan kerja pemerintah akan menjadi lebih mudah, begitu juga dengan penyebaran agama Kristen, dan akan muncul hubungan yang erat antara penduduk dan Belanda. Selanjutnya ditunjukkan pula harapan yang positif bagi pedagang buku Belanda yang lama kelamaan akan dapat memperoleh pasaran yang besar sekali di Hindia Belanda. Keberatan terhadap masuknya bahasa Belanda sebenarnya adalah, pertama, bahwa bahasa Melayu sedikit banyak telah memenuhi fungsi sebagai bahasa pergaulan umum dan bahkan di Minahasa telah mendesak bahasa-bahasa pribumi; kedua, bahwa dengan pengetahuan bahasa Belanda kebejatan moral akan bertambah karena pengaruh naskah berbahasa Belanda; ketiga, bahwa bahasa Belanda pasti akan mengalami perubahan menjadi semacam bahasa 'Belanda-Hindia' yang tidak diinginkan; keempat, bahwa penduduk Pribumi hanya akan menjadi congkak karenanya, dengan segala kesulitan yang ditimbulkannya terhadap

pemerintahan; tetapi juga—argumen kelima—bahwa bahasa Belanda amat sulit dipelajari khususnya bagi orang Timur. Memang juga ada keberatan terhadap bahasa Melayu, karena diasosiasikan dengan Islam, sedangkan *lingua franca* Melayu sebenarnya hampir-hampir dapat dianggap 'bahasa'. Tetapi seperti juga di Nias, argumen yang menang adalah bahwa memaksa seluruh rakyat mempelajari satu bahasa pergaulan yang baru dan sangat sulit merupakan suatu yang sangat bodoh.

Setelah enam tahun didiskusikan, pada bulan Juni 1864 secara definitif disisihkan pandangan untuk memasukkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar atau sebagai mata pelajaran di sekolah pribumi, tetapi sekaligus diputuskan untuk sebanyak mungkin memberikan dukungan apabila ada kebutuhan akan pengetahuan bahasa Belanda. Rencana untuk membelandakan Hindia Belanda selanjutnya ditinggalkan, tetapi pada waktu yang bersamaan dianggap penting bila setidak-tidaknya kaum elite pribumi memiliki pengetahuan bahasa Belanda karena bahasa Belanda merupakan jalan menuju ke Barat, jalan menuju perkembangan dan peradaban. Melalui bahasa Belanda orang dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan kemahiran Barat yang bisa saja penting artinya bagi Hindia Belanda. Bahasa Belanda harus berfungsi sebagai 'bahasa sumber' untuk penyerahan pengetahuan Barat ke bahasa-bahasa pribumi, yang masih terlalu miskin dan dianggap kurang cocok untuk pengalihan pengetahuan ilmiah, misalnya di bidang ilmu hukum atau kedokteran. Pada saat bersamaan bahasa Belanda dapat juga membantu pengembangan bahasa-bahasa pribumi, sehingga bahasa-bahasa itu lambat laun dapat mengambil alih peran bahasa Belanda. Dengan demikian bahasa Belanda dapat berfungsi sebagai bahasa Latin-nya Hindia Belanda.

Hasil langsung kebijaksanaan baru itu adalah pada 1864 ujian masuk *ELS* menjadi lebih supel; untuk pertama kalinya dijanjikan premi untuk penyusunan buku-buku ajar bahasa Belanda sebagai bahasa asing; bahasa Belanda sebagai mata pelajaran (kelak juga sebagai bahasa pengantar) diterapkan di Sekolah Guru Pribumi, di Sekolah Amtenar Pribumi (sejak 1900 dikenal sebagai *Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren, Osvia*), dan di Sekolah Dokter-Djawa (dari 1902 dikenal dengan nama *School ter Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia*); beberapa sekolah mendapat status sebagai Sekolah Spesial, tempat anak-anak pribumi Kristen boleh mengikuti pendidikan berbahasa Belanda. Surat edaran pemerintah yang dikirimkan pada 1870 dan 1874 berisi imbauan untuk para pegawai pribumi agar memberikan pendidikan Barat kepada anak-anak mereka. Walaupun tidak ada lagi 'pembelandaan' penduduk pribumi, suatu kebijakan yang

menciutkan pembelajaran bahasa Belanda oleh penduduk pribumi –setidak-tidaknya pada lapisan masyarakat yang lebih tinggi– juga tidak ada lagi. 'Gerbang menuju ke Barat' sekarang sudah terbuka, meski untuk sementara waktu belum lebar. Jumlah penduduk pribumi yang berbahasa Belanda pada 1900 tidak lebih besar dari 5.000 orang; di Jawa dan Madura berarti kira-kira satu dari 8.000 penduduk mengenal bahasa Belanda, sebagian besar laki-laki. tinggal dan bekerja di salah satu kota besar.

BAHASA BELANDA SEBAGAI "UTANG BUDI"

Setelah 1900 kemungkinan untuk mengikuti pendidikan berbahasa Belanda bertambah karena pengaruh 'Politik Etis' kolonial. Bahasa Belanda sebagai 'gerbang menuju ke Barat' sekarang juga mendapat arti 'etis', suatu pembayaran 'utang budi'. Bahasa Belanda tidak lagi hanya dilihat sebagai 'bahasa sumber', bahasa bantu yang memberi jalan ke pengetahuan Barat yang selanjutnya dengan bantuan bahasa daerah sendiri harus disebar, tetapi sekaligus menjadi faktor penting dalam proses 'pendidikan menuju otonomi.'

Betapa Belanda harus menebus satu 'utang budi' di Hindia Belanda, dengan membawa peradaban dan perkembangan melalui pendidikan berbahasa Belanda, dari pihak pribumi diajukan oleh Raden Mas Pandji Sosro Kartono dalam pidatonya *Het Nederlandsch in Indië* (Bahasa Belanda di Hindia Belanda), yang dibawakannya di Gent (Belgia) pada 1899 sebagai penampilan pertama seorang Indonesia dalam bahasa Belanda di Eropa. Menurutny hal itu terutama akan penting bagi Belanda sendiri. Berkata Sosro Kartono (1899: 2):

Pertama-tama, ini adalah bagi kepentingan Anda. Saya ingin menerangkan bahwa simpati yang Anda harapkan dari penduduk Pribumi, tidak ada [. . .]. Rakyat pada umumnya tidak menyadari akan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda [. . .]. Tanamkanlah pada orang Jawa, dengan perantaraan bahasa Anda kesadaran akan rasa terima kasih, yang Anda berhak mendapatkannya.

Kami masih kanak-kanak, dibandingkan dengan Anda [. . .]. Di masa-masa yang akan datang, semuanya ini tergantung pada pendidikan awal di bidang kerohanian dan moral, apakah kami akan memperlakukan Anda sebagai pemandu, ayah, saudara, teman atau sebagai orang asing atau musuh.

Saudara perempuannya, Raden Adjeng Kartini –satu dari sedikit wanita pribumi yang pada saat itu sudah menguasai bahasa Belanda–juga menunjukkan pentingnya bahasa Belanda bagi Hindia-Belanda. Pada tanggal 6 November 1899 ia menulis surat:

KEES GROENEBOER

Bila saya menguasai bahasa Belanda, maka masa depan saya terjamin. Lapangan kerja menjadi terbuka dan saya seolah-olah anak manusia yang bebas. Sebab saya sebagai seorang anak Jawa tahu seluk-beluk dunia pribumi [. . .]. Banyak yang hingga saat ini masih merupakan teka-teki dan masih gelap bagi orang Eropa dapat saya pecahkan hanya dengan beberapa patah kata saja [. . .]. Kehalusan-kehalusan yang ada di dalam dunia pribumi, yang oleh seorang Indolog terbesar pun tidak dapat dirasakan, dapat diangkat ke permukaan oleh seorang pribumi.

Kartini memperlihatkan dalam surat dari awal tahun 1900 bahwa pengetahuan bahasa Belanda juga penting bagi emansipasi wanita pribumi:

Saya sangat ingin mempelajari bahasa Belanda dengan sempurna dan menguasainya, sehingga saya bisa berbuat apa saja dengannya - lalu saya akan berusaha lewat pena saya menarik perhatian mereka, yang dapat menolong kami, berusaha mengadakan perbaikan di dalam nasib wanita Jawa (Kartini 1912: 15, 41)

Keinginan untuk memberikan pendidikan Barat kepada sebagian penduduk pribumi berhubungan dengan Politik Etis, yang mengakibatkan di satu pihak kekuasaan pemerintah bertambah luas karena 'pasifikasi' daerah-daerah di luar Jawa, dan di pihak lain bertambah besarnya campur tangan pemerintah secara langsung di bidang ekonomi, pendidikan dan pemerintahan. Dampaknya, Politik Etis meningkatkan kebutuhan akan tenaga pribumi yang berbahasa Belanda, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Pada dua dasawarsa pertama abad ke-20 permintaan akan tenaga pribumi yang berpendidikan Barat semakin besar, dan berhubungan ini penawaran pendidikan Belanda juga semakin besar, sedangkan setelah tahun 1920 Politik Etis dalam pendidikan Barat dihentikan karena pasar kerja bagi mereka yang menguasai bahasa Belanda mencapai titik jenuh.

Perkembangan ekonomi menambah besar keinginan untuk memberikan pendidikan Belanda kepada kaum pribumi, sekaligus semakin besar pula keinginan kaum pribumi untuk dapat memberikan pendidikan Barat kepada anak mereka. Sebenarnya untuk mereka di situlah kunci untuk dapat maju secara sosial. Faktor-faktor itu merupakan dasar pembentukan Sekolah Belanda Pribumi (*Hollands-Inlandse School, HIS*) pada 1907 dan Sekolah Belanda-Cina (*Hollands-Chinese School HCS*) pada 1908, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Terutama dengan pembentukan *HIS* muncul banyak diskusi yang sengit mengenai masalah bahasa pengantar pada pendidikan Barat. 'Masalah bahasa pengantar' juga merupakan tema utama pada rangkaian Kongres Pendidikan Kolonial yang diselenggarakan di Den Haag pada 1916 dan 1919 dan di Batavia pada tahun 1918. Dalam diskusi itu, yang diikuti baik oleh orang Eropa maupun orang pribumi, ada dua kecenderungan.

Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa hanya pendidikan berbahasa ibu—jadi dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar baik bagi anak. Pemakaian bahasa pengantar—asing seperti bahasa Belanda bukan saja tidak bertanggung jawab dari segi ilmu pendidikan, tetapi juga merugikan masyarakat, karena pendidikan itu tidak akan pernah dapat mencapai massa rakyat—dilihat dari tingkat kesulitan bahasa Belanda, biaya dan jumlah guru yang dibutuhkan; sedangkan menawarkan bahasa Belanda kepada elite saja akan memisahkan elite itu dari masyarakat mereka sendiri karena pembelandaan yang mendalam akan berdampak pada pengabaian bahasa daerah mereka. Jadi, tidaklah mungkin bagi mereka memindahkan pengetahuan Barat yang diperolehnya ke masyarakat. Keberatan bahwa pengetahuan dan ilmu Barat tidak dapat disampaikan dalam bahasa daerah, dianggap tidak tepat. Perkembangan bahasa daerah justru terhambat karena bahasa itu tidak pernah dipergunakan. Bahasa Belanda karenanya hanya akan menghambat perkembangan menuju kemandirian nasional. Kemahiran untuk dapat membaca buku dan majalah berbahasa Belanda memang dapat membawa keuntungan, karena itu pengetahuan pasif bahasa Belanda boleh dijadikan salah satu mata pelajaran.

Di lain pihak ada kelompok yang menganggap bahasa daerah masih belum cocok untuk mengalihkan pengetahuan Barat. Bukankah dalam bahasa pribumi hampir-hampir tidak ada buku ajar, sedangkan pada pendidikan lanjutan hanya dapat ditempatkan orang-orang Belanda karena kurangnya kader pribumi yang terdidik. Penerjemahan buku-buku Eropa dalam skala besar sementara itu juga tidak dapat dilaksanakan karena biaya dan minimnya tenaga penerjemah. Jadi bahasa Belanda untuk sementara waktu menjadi kunci pembuka kamar harta karun pengetahuan, ilmu dan kebudayaan Barat. Untuk dapat menggunakan kunci itu dengan baik tidak hanya diperlukan pengetahuan yang pasif, tetapi suatu penguasaan bahasa Belanda aktif sehingga orang akan berpikir dalam bahasa itu. Hal itu hanya akan dicapai apabila bahasa tersebut dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Pendidikan seperti itu tentu saja hanya diperuntukkan bagi elite masyarakat, yang selanjutnya secara perlahan-lahan dapat mengembangkan bahasa daerah dan memindahkan pengetahuan yang telah diperolehnya kepada sekelompok penduduk yang lebih besar. Bahwa orang pribumi yang mendapat pendidikan dalam bahasa Belanda akan mengalami semacam denasionalisasi sehingga mereka akan kehilangan kontak dengan massa rakyat, dapat dicegah dengan tidak mengabaikan pendidikan dalam bahasa daerah. Para penganut paham ini juga menunjuk pada kepentingan politik. Pembelandaan pada kaum elite pribumi akan memperkuat hubungan

batin antara Hindia Belanda dan Negeri Belanda, dan meningkatkan kesadaran rasa setia kawan, yang terutama penting bagi perkembangan Hindia Belanda sendiri.

Wakil dari sudut pandang 'bahasa daerah sebagai bahasa pengantar' yang paling terkenal adalah D. J. A. Westerveld, seorang guru Sekolah Menengah Atas (*HBS*), yang sosial-demokrat, sedangkan wakil dari sudut pandang 'bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar' adalah seorang dokter Jawa, yang nasionalis, Tjipto Mangoenkoesoemo. Suatu debat antara mereka di Semarang pada akhir 1915 menarik banyak perhatian; bayangkan, seorang sosialis Belanda membela bahasa Jawa dan seorang nasionalis Jawa membela bahasa Belanda.

Westerveld menjadi pendukung bahasa daerah, yang karena pembelandaan pendidikan tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Para intelektual pribumi tidak mengenal bahasa ibu mereka dengan cukup baik lagi untuk dapat menuangkan pikiran dan perasaan mereka dan mereka lebih suka memakai bahasa Belanda untuk itu. Bahasa Belanda di *HIS*, menurut Westerveld hanya untuk kepentingan Belanda —penawaran pendidikan Barat hanya tergantung pada permintaan akan tenaga berbahasa Belanda di pemerintahan dan perusahaan—dan tidak menyangkut kepentingan Jawa; bahasa Belanda mempersempit jalan menuju pengetahuan dan dengan demikian menuju kekuasaan. Perkembangan menuju kemandirian nasional akan diperlambat karena Hindia Belanda menjadi semakin tergantung kepada kaum intelektual Belanda, sedangkan kepercayaan akan kemampuan sendiri, juga kepercayaan akan kualitas bahasa sendiri, dirusakkan (Westerveld 1916: 270—271).

Sangat menarik bahwa hanya sedikit orang pribumi yang mengikuti pendapat 'bahasa daerah sebagai bahasa pengantar'. Pendapat ini terutama didukung oleh orang Eropa, tidak semata-mata berdasar argumentasi Westerveld yang bernada politis, tetapi terutama karena pertimbangan-pertimbangan praktis dan didaktis. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa bahasa Belanda memang harus diberikan hanya sebagai mata pelajaran dan setidaknya-tidaknya harus diajarkan pengetahuan pasif bahasa Belanda.

Sudut pandang yang berlawanan diutarakan oleh Tjipto Mangoenkoesoemo (*De Banier* 8-9, 1916: 139—140) yang memvonis mati bahasa Jawa, karena tidak lagi memenuhi tuntutan zaman dan tidak cocok untuk menuangkan ide-ide dan pemikiran modern, atau untuk mengalihkan pengetahuan ilmiah dan teknis. Karena karakternya yang tidak 'demokratis', bahasa Jawa juga tidak cocok untuk menjadi bahasa pergaulan umum. Oleh

karena itu sebaiknya bahasa Belanda dijadikan bahasa pemersatu di Hindia Belanda. Adanya keberatan bahwa bahasa Belanda begitu sulit bagi orang pribumi, menurut Tjipto Mangoenkoesoemo dapat dipecahkan dengan menyesuaikan bahasa Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Seperti di Afrika Selatan, maka akan muncul varian spesial bahasa Belanda yang sesuai kebutuhan Hindia Belanda (Mangoenkoesoemo 1918: 274).

Cukup mencolok bahwa pembelandaan seperti yang dikemukakan oleh Tjipto Mangoenkoesoemo hanya didukung oleh beberapa orang Eropa. Yang menang adalah pendapat yang tidak begitu ekstrem yang mengatakan bahwa bahasa Belanda untuk sementara waktu masih harus menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan Barat, tetapi sekaligus harus diperhatikan pendidikan dalam bahasa pribumi sehingga lambat laun bahasa-bahasa daerah dapat menggantikan posisi bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sudut pandang 'bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar' yang tidak begitu ekstrem itu didukung hampir sepenuhnya oleh pihak Pribumi sedangkan kebanyakan orang Eropa juga setuju.

Di pihak pribumi perluasan pendidikan berbahasa Belanda semakin dituntut, tetapi pemerintah ingin menggantungkan kapasitas *HIS* pada kebutuhan akan tenaga kerja berbahasa Belanda di pasar kerja. Kelebihan produksi tenaga kerja ini tidak diinginkan, dianggap terlalu mahal, dan juga dapat membahayakan negara, karena semua itu hanya akan menyebabkan kekecewaan, kehilangan muka dan ketidakpuasan, dan karenanya orang akan cepat tanggap akan propaganda nasional. Komisi Pendidikan Belanda - Pribumi (*Hollands-Inlands Onderwijs-Commissie; HIOC*), yang dibentuk sehubungan dengan permasalahan itu, pada 1931 menganjurkan agar pendidikan Barat untuk orang pribumi tidak lagi diperluas dan membiarkan perkembangan pendidikan berbahasa Belanda tergantung pada keuntungan ekonomi.

Sebagai reaksi atas saran itu muncul dua arah pemikiran. Yang pertama sepenuhnya setuju dengan pendapat Komisi dan menganggap setiap kelebihan produksi dari penduduk pribumi berbahasa Belanda sebagai hal yang membahayakan negara. Sebagian besar nasionalisme yang sudah muncul saat itu, menurut pendapat ini, disebabkan oleh politik pendidikan yang mula-mula mengasingkan penduduk pribumi dari lingkungannya sendiri dan kemudian tidak dapat memberikan apapun sebagai ganti rugi. Oleh karena itu muncul sekelompok pribumi dengan kelumpuhan batin, yang setengah-intelektual, tidak puas dan kecewa, yaitu dapat muncul semacam 'proletariat kerah-putih', yang mudah dapat dipengaruhi propaganda para nasionalis. Jelas bahwa tidak semua orang mendukung

politik pendidikan ini. Banyak yang justru membela perluasan lebih lanjut pendidikan Barat bagi orang pribumi karena perluasan itu akan membawa pengaruh yang besar sekali bagi perkembangan masyarakat. Karenanya, tidak hanya keuntungan ekonomi yang boleh menentukannya, tetapi juga keuntungan budaya dan keuntungan pribadi. Bukan hanya kebutuhan obyektif (ekonomi dan pemerintahan) yang harus menentukan penawaran pendidikan, tetapi justru kebutuhan subyektif akan pendidikan berbahasa Belanda. Tetapi pendapat yang 'progresif' ini—yang didukung terutama oleh pihak pribumi dan juga oleh orang-orang Eropa yang lebih progresif—tidak pernah diambil alih oleh pemerintah. Pada awal 1930-an perluasan pendidikan berbahasa Belanda sama sekali tidak dipikirkan lagi, karena krisis ekonomi yang parah mengakibatkan penghematan besar. Jumlah siswa *HIS* yang kurang lebih 60.000 pada tahun ajaran 1930/31 akan tetap sama dan hanya bertambah pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia II menjadi sekitar 70.000 orang.

Pada kurun waktu itu, *HIS* sebagai produsen tenaga berbahasa Belanda mendapat saingan berat karena munculnya 'pendidikan liar', yang pada akhir 1930-an jumlahnya dua kali lipat dibandingkan pendidikan reguler. Sekolah-sekolah 'liar' sudah ada sejak awal 1920-an, tujuannya membuat pendidikan bermanfaat bagi paham keagamaan atau paham politik tertentu,³ tetapi juga karena penawaran pendidikan dari pihak pemerintah semakin tertinggal dalam peningkatan kebutuhan subyektif pendidikan berbahasa Belanda. 'Pendidikan liar' meledak terutama pada 1930-an. Demikianlah inisiatif swasta telah mengisi kekosongan yang oleh pemerintah dibiarkan terbuka. Pertumbuhan jumlah penduduk pribumi yang berbahasa Belanda menurut perkiraan 5.000 orang pada 1900 menjadi sekitar 187.000 pada 1930, sebagian besarnya disebabkan oleh *HIS*. Ledakan pertumbuhan yang terjadi sejak saat itu terutama disebabkan oleh 'pendidikan liar'. Pada 1942 jumlahnya lebih dari 860.000 orang; atau bila penduduk pribumi dengan hanya pengetahuan 'pasif' ikut diperhitungkan, jumlahnya menjadi hampir 1.3 juta.

³Dilihat dari segi politik, umpamanya sekolah-sekolah Sarekat Ra'jat yang berorientasi komunis; dilihat dari segi keagamaan terdapat sekolah-sekolah Islam Muhammadiyah; dilihat dari segi pendidikan dan nasionalistis-budaya, contohnya sekolah-sekolah Taman Siswa dari Ki Hadjar Dewantara (Soewardi Soeryaningrat), sekolah-sekolah Budi-Utomo, sekolah-sekolah Pasundan, sekolah-sekolah Arjuna yang teosofis, sekolah-sekolah himpunan pendidikan Pribumi Perserikatan Goeroe Hindia-Belanda (PGHB), Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) dan Pergoeroean Ra'jat; dan yang bermotifkan ekonomi 'sekolah-sekolah dagang' di Minahasa dan Maluku. Di samping itu juga berdiri berbagai sekolah yang tidak berdasarkan motif idiiil tetapi semata-mata karena pertimbangan komersial.

KEBIJAKAN DWIJALUR: BAHASA BELANDA DAN BAHASA MELAYU

Dalam diskusi mengenai bahasa pengantar, bahasa Melayu hampir-hampir tidak dibicarakan. Hanya seorang nasionalis Jawa, Soewardi Suryaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, yang pada 1916 membela pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam seluruh pendidikan—juga pada *ELS*—agar bahasa Melayu dapat menjadi bahasa persatuan di Nusantara, karena bahasa ini lebih sederhana dan juga 'lebih demokratis' dibanding bahasa Jawa (Surya Ningrat 1916: 32–72). Pendapat ini pada saat itu menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan, terutama pada kalangan nasionalis-budayawan Jawa, yang melihat adanya kemunduran yang besar dan penindasan terhadap bahasa Jawa sendiri. Sepuluh tahun kemudian, pada 1928, bahasa Melayu dinyatakan sebagai bahasa Indonesia, bahasa pemersatu Republik Indonesia di kemudian hari. Tetapi pencanangan itu tidak berarti akan merugikan bahasa Belanda. Hampir seluruh pemimpin pribumi berpendidikan Belanda dan karena itu mereka lebih suka mengungkapkan diri dalam bahasa Belanda. Seberapa jauh mereka kebelanda-belandaan, misalnya, juga terbukti dari kata-kata Sukarno yang dalam memoarnya pada 1965 menyatakan tentang bahasa Belanda, "It became the language in which I did my thinking. Even today I automatically curse in Dutch. When I pray to God, I pray in Dutch" (Sukarno 1965: 67).

Pilihan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dan bukan bahasa Belanda disebabkan di Indonesia pada dasarnya hanya ada satu *lingua franca*, yaitu bahasa Melayu, tetapi juga karena politik bahasa yang tidak pernah mendukung penyebaran bahasa Belanda secara luas. Bahasa Belanda hanya ditujukan bagi elite pribumi selama ada kebutuhan sosial ekonomi. Sampai pada pertengahan tahun 1920-an sepertinya begitu keadaannya—menurut ahli bahasa Takdir Alisjahbana pada 1933—bahwa bahasa Belanda akan dapat memenuhi fungsi bahasa pergaulan umum Nusantara. Bahasa Belanda semakin banyak diminati penduduk pribumi, dan bagi orang pribumi dari elite masyarakat bahasa Belanda bukanlah bahasa asing lagi tetapi telah menjadi semacam 'bahasa ibu kedua'.

Juga setelah pernyataan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, pemerintah tidak menghapuskan politik bahasa mereka yang membatasi pendidikan berbahasa Belanda. Justru sebaliknya, karena kecemasan akan munculnya 'proletariat kerah-putih' pribumi yang mudah terpengaruh propaganda kaum nasionalis, pada waktu itu pemerintah membatasi pendidikan berbahasa Belanda. Bahasa Belanda jelas dianggap lebih

berbahaya untuk pertumbuhan nasionalisme dibanding bahasa Melayu. Pemilihan bahasa Melayu bagi kaum nasionalis sepertinya juga merupakan reaksi atas politik bahasa yang membatasi pendidikan berbahasa Belanda, dan oleh karena itu dalam kenyataannya tidak diberikan pilihan lain kepada mereka.

Bahasa Melayu dipilih oleh kaum nasionalis *meskipun* sebagian besar dari mereka berbicara dan berpikir dalam bahasa Belanda, tetapi pada kenyataannya juga justru *karena itulah* mereka melakukannya. Bagi kaum intelektual pribumi, sebenarnya bahasa Belanda bukan hanya jalan untuk memperoleh pengetahuan Barat, tetapi sekaligus sebuah jalan yang memungkinkan untuk menjauhkan diri dari masyarakat 'tradisional' mereka sendiri dan menilainya dari luar, untuk membuat penilaian yang kritis terhadap seluruh masyarakat kolonial, dan juga jalan untuk menjalin kontak internasional dengan para antiimperialis, antikolonialis, dengan kaum sosialis dan komunis. Selain itu bahasa Belanda memungkinkan mereka merenungkan suatu masyarakat pascakolonial dan menyusun rencana-rencana untuk masa depan. Dalam perspektif ini terlihat adanya pengetahuan bahasa Belanda menciptakan persyaratan untuk pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Kesimpulan pakar Indonesia, Benedict Anderson (1990: 136--137, 139) dalam hal ini tepat:

Paradoxically enough, the spread of Indonesian as a national language was only possible once Dutch had become the inner language of the intelligensia: Only then could Indonesian be developed to receive the new thinking, and then to diffuse it more widely within colonial society

Justru pemilihan bahasa Melayulah yang telah memungkinkan untuk meneruskan pandangan-pandangan yang telah diperoleh melalui bahasa Belanda kepada rakyat, melalui suatu bahasa yang dapat menyebar luas, lagi pula tidak mengenal bentuk-bentuk sopan santun sosial seperti dalam bahasa Jawa. Oleh karena itu pemakaian bahasa Melayu; menurut Anderson (1990: 139) menimbulkan rasa 'demokratis.' Dikatakannya, "The language [. . .] offered the possibility of relating socially in an essentially Dutch manner, but without the mediation of the Dutch language".

Yang masih tertinggal adalah bahasa Belanda yang berfungsi sebagai gerbang menuju ke Barat, fungsi yang sebenarnya pada mulanya belum diisi oleh bahasa Melayu, karena kurangnya kemungkinan untuk menuangkan pengertian-pengertian Barat. 'Pendidikan liar' berbahasa Belanda pada tahun-tahun itu lebih berkembang daripada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan seluruhnya berada di luar campur tangan pemerintah dan menjadi bagian dari masyarakat pribumi sendiri yang nyatanya telah

memegang kendalinya. Bila pemerintah tidak cukup mengatur kemungkinan untuk memenuhi permintaan pribumi akan pendidikan bahasa Belanda, maka mereka akan melakukannya sendiri.

Juga dalam lingkungan Eropa, pada 1930-an dibicarakan masalah pilihan antara bahasa Belanda dan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, tetapi lebih sebagai permasalahan budaya daripada permasalahan politis. Penyebaran yang telah dialami oleh baik bahasa Belanda maupun bahasa Melayu sebenarnya lebih karena politik bahasa yang pragmatis, yang bersifat praktis, ekonomis dan terutama finansial. Karena sekarang bahasa Melayu tiba-tiba digunakan sebagai alat perlawanan politis, pada orang Eropa muncul pertanyaan apakah di masa lalu pengalihan bahasa dan budaya Belanda cukup diperhatikan. Mengesankan, penilaian yang dilakukan oleh guru besar dari Perancis Bousquet mengenai politik bahasa dan budaya di Hindia Belanda. Bousquet (1940: 89) menyatakan keheranannya mengenai ketidakacuhan orang Belanda bertalian dengan bahasa dan budaya mereka sendiri:

Dutch colonial policy has never for a moment considered that the Dutch language could play a part in the culture and civilization to be given to the native. On the contrary, by opposing him with a language intended to mark the distance which sets him apart from the European, the Dutch have striven and still strive, though vainly, to deprive their ward of contact with the outside world.

Bagaimanapun juga, menurut Bousquet, orang Belanda sendiri yang harus disalahkan bahwa kaum nasionalis memilih bahasa Melayu sebagai senjata untuk memerangi pengaruh Belanda:

They believed themselves to be forging a chain for their subjects, but they see now that they have given them a [. . .] terrible psychological weapon, a common national language with which to express their common national aspirations.

Berdasar pendapat Bousquet itu muncul diskusi yang sengit mengenai politik bahasa dan budaya Belanda, yang menjadi ekstra aktual sesudah Mei 1940. Karena Perang Dunia II hubungan dengan Negeri Belanda terputus dan pada diri orang Belanda di Hindia Belanda muncul perasaan bahwa merekalah yang pada waktu itu harus bertanggung jawab atas pemeliharaan identitas Belanda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik bahasa di Hindia Belanda, pemerintah merumuskan kebijakan dwijalur, bahasa Melayu dan Bahasa Belanda mendapatkan tempat yang sama sebagai mata pelajaran dalam pendidikan pribumi, dan pada prinsipnya bahasa daerah harus dipakai sebagai pengantar: Bahasa Melayu sebagai penopang persatuan budaya di Nusantara, bahasa Belanda sebagai penopang kontak ekstern

dengan Barat. Demikianlah, pada 1941 bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib pada Sekolah Menengah Pertama (*MULO*) dan pada Sekolah Dagang, karena mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan bahasa Indonesia secara umum—sebagai *lingua franca*, bahasa dagang, bahasa pemerintahan, bahasa hukum, dan bahasa pemersatu. Kursus bahasa Melayu dan bahasa Belanda sebagai bahasa asing yang disiarkan radio Hindia Belanda *NIROM* sejak 1939 adalah dampak dari politik bahasa yang baru. Tetapi politik bahasa yang baru ini sesungguhnya tidak lagi mendapat kesempatan akibat serbuan Jepang pada bulan Maret 1942.

Sesudah Perang Dunia II dicoba lagi untuk melaksanakan politik bahasa dwijalur ini, bahasa daerah menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan dan baik bahasa Melayu maupun bahasa Belanda menjadi mata pelajaran; bahasa Melayu demi kepentingan perkembangan Indonesia mendatang dan demi perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sementara bahasa Belanda sebagai jalan menuju budaya Barat dan untuk menjalin kontak dengan dunia luar. Pada 1947 dimulai pelaksanaan politik baru ini, terutama di Indonesia bagian Timur, tetapi wajarlah bila hal itu tidak banyak berarti lagi.

EVALUASI

Sebenarnya berapa besar pembelandaan pada kelompok penduduk pribumi. Menurut Sensus 1920 sekitar 60.000 orang pribumi (80% daripadanya laki-laki) dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, 0,12% dari 48 juta total penduduk pribumi. Pada Sensus 1930 jumlahnya menjadi 187.000 ribu (75%-nya laki-laki), 0,3% dari 59 juta penduduk. Meskipun pada 1940 tidak lagi dilakukan penghitungan, berdasarkan statistik pendidikan 1930-an dapat diperkirakan bahwa menjelang pecahnya Perang Dunia II pada bulan Maret 1942 ada sekitar 860.000 penduduk pribumi yang berbahasa Belanda (60% daripadanya laki-laki), atau sekitar 1,2% dari 70 juta penduduk. Selanjutnya sekitar 400.000 penduduk pribumi menguasai bahasa Belanda secara pasif sehingga secara total 2% dari penduduk pribumi memiliki pengetahuan bahasa Belanda. Ahli bahasa Takdir Alisjahbana pada 1933 dengan antusias menyatakan bahwa bahasa Belanda benar-benar telah merasuk dan bahwa “orang di kota dan di kampung, di sekolah, di jalan dan di rumah berbahasa Belanda”. Sekelompok pemuda pribumi yang jumlahnya makin besar “bangun dalam bahasa Belanda dan tidur pun dalam bahasa Belanda” (Alisjahbana, 1978: 30–31). Dengan demikian cita-cita politik bahasa dari pedagog bahasa yang pada waktu itu terkenal, G. J. Nieuwenhuis, menjadi

kenyataan.⁴ Dalam pandangannya, bahasa Belanda tidak hanya penting untuk perkembangan Hindia-Belanda, tetapi juga penting untuk Negeri Belanda:

Penyebaran bahasa Belanda dan budaya Belanda merupakan cara yang terbaik, untuk mengekalkan kepentingan ekonomis-idiil kami. Kalau pada akhirnya, sejuta orang Hindia-Belanda yang terpelajar berbicara atau mengerti bahasa kami (baru 2% penduduk), maka buku-buku Belanda, buruh Belanda, pikiran-pikiran Belanda akan tetap berpengaruh dan barang-barang Belanda akan tetap laku selama periode panjang yang diperlukan, dari koloni menjadi negara merdeka (Nieuwenhuis 1930: 14).

Jumlah sekitar 2% itu akhirnya hampir dicapai, tetapi dengan demikian tidak berarti untuk satu periode yang lama kepentingan politik dan ekonomi Belanda berhasil diabadikan. Bagaimanapun juga bahasa Belanda tidak lagi semata-mata milik kaum elite, tetapi telah merasuk ke lapisan yang lebih luas. Tujuan yang diinginkan Nieuwenhuis, mewujudkan suatu lapisan tinggi dalam masyarakat yang fasih berbahasa Belanda seperti para dokter, pegawai pemerintah dan tenaga pengajar pada pendidikan Barat, dan pada lapisan menengah masyarakat yang lebih luas dengan terutama penguasaan pasif bahasa Belanda, untuk berbagai fungsi menengah seperti para pengawas, juru tulis, guru pada pendidikan pribumi, pramuniaga toko, karyawan pos dan telepon, untuk kurun waktu 1930—1942 sebagian besar terpenuhi.

PENUTUP

Pada akhir bulan Januari 1949 Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda menyerahkan kedaulatan sebelum 1 Januari 1950. Tiga hari kemudian, pada 1 Februari 1949, di Fakultas Sastra di Jakarta dibuka jurusan khusus untuk Bahasa dan Kesusatraan Belanda. Studi itu seharusnya menjadi mahkota kebijakan bahasa dan kebudayaan Belanda yang baru: untuk pertama kalinya sungguh-sungguh dipikirkan penyebaran bahasa Belanda untuk penduduk pribumi. Akhirnya memang inilah mahkota pada satu kebijakan yang gagal, yang tidak pernah cukup mendukung permintaan Indonesia akan bahasa Belanda. Kebutuhan obyektif (ekonomi dan pemerintahan) akan bahasa Belanda tidak pernah sesuai dan disesuaikan dengan kebutuhan subyektif akan bahasa Belanda dari pihak Indonesia.

⁴Lihat juga K. Groeneboer, "Nieuw taalonderwijs: De betekenis van G. J. Nieuwenhuis voor het Nederlands in Indië," dalam K. Groeneboer (ed.), *Studi Belanda di Indonesia - Nederlandse studiën in Indonesië*. Jakarta: Djambatan; h. 319—331

Politik bahasa, bertalian dengan bahasa Belanda, karenanya bisa dikatakan selalu terlalu sedikit dan terlalu terlambat.

Demikianlah. Seluruh permasalahan bahasa Belanda pada saat itu tidak lagi relevan. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat – terutama pada masa Jepang – dan tentu saja sudah lama berfungsi sebagai bahasa pemersatu. Hanya hubungan antara bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan bahasa-bahasa daerah setelah masa itu selalu menjadi bahan diskusi, terutama sebagai 'masalah bahasa' dalam pendidikan dasar. Posisi bahasa Indonesia tidak lagi dibicarakan, yang masih ada dan justru sekarang ini muncul adalah masalah kualitas bahasa Indonesia. Kata akhir mengenai hal itu sepertinya belum dirumuskan.

DAFTAR ACUAN

- Alisjahbana, S. Takdir (1978), "Bahasa Indonesia," dalam S. Takdir Alisjahbana, *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa: Kumpulan Esai 1932–1957*. Jakarta: Dian Rakyat; cet. I; h. 20–53.
- Anderson, Benedict R. O'G. (1990), "The Languages of Indonesia Politics," dalam Benedict R. O'G Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca/London: Cornell University Press; cet. I; h. 123–151.
- Bousquet, G. H. (1940), *A French View of the Netherlands Indies*. London/New York: Oxford University Press.
- Kartini, Raden Adjeng (1912), *Door duisternis tot licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk*. 's-Gravenhage: Luctor et Emergo; cet. III.
- Mangoenkoesoemo, Tjipto (1918), "De voertaal," *De School van nederlandsch-Indië*, 8-18; h. 272–274.
- Nieuwenhuis, G. J. (1930), *Het Nederlandsch in Indië: Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting*. Groningen/Den Haag/Weltevreden: Wolters; cet. II.
- Sosro Kartono, Raden Mas Pandji (1899), "Het Nederlandsch in Indië," *Neerlandia 1899-10*; h. 1–3.
- Sukarno (1965), *An Autobiography as Told to Cindy Adams*. New York.
- Surya Ningrat, Raden Mas Suardhy (1916), "Welke plaats behooren bij het onderwijs in te nemen eensdeels de inheemsche talen, ook het Chineesch en Arabisch, anderdeels het Nederlandsch?" dalam *Prae-adviezen van het Eerste Koloniaal Onderwijscongres*, 's-Gravenhage 28–30 aug. 1916. 's-Gravenhage: Korthuis.
- Westerveld, D. J. A. (1916), "Het Nederlandsch als voertaal op de Inlandshe scholen," *Het Middelbaar Onderwijs in Nederlandsch-Indië* 11, h. 179–186; 219–223; 267–271.